
Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Moch. Agung Prasetyo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
E-mail: mochagungp@gmail.com

Article History:

Received: 25 Januari 2023

Revised: 25 Februari 2023

Accepted: 28 Februari 2023

Keywords: *desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi,*

Abstract: *Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaruh dari adanya desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari instansi terkait atau dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya dalam bentuk laporan resmi / publikasi. Desentralisasi fiskal tidak selalu mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih baik. Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat ditemukan dalam kualitas APBD dan kualitas pengelolaan anggaran. Alokasi APBD untuk perbaikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Peningkatan kapasitas ekonomi regional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting untuk peneliti dan akademisi lainnya karena memberikan sebuah perkembangan desentralisasi fiskal serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keterbatasan dari studi ini adalah bahwa adalah pengumpulan data yang tidak mudah diakses dan sebagai hasil harus bergantung pada berbagai sumber. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting. Ini telah memberikan perkembangan ekonomi dalam pelaksanaan desentralisasi. Perbedaan sumber daya menjadikan perbedaan perkembangan ekonomi tiap daerah berbeda. Selanjutnya penelitmelihat persentase untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi.*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional (Pujiati, 2004). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. Salah satu tujuan dari penggunaan fiskal yang berasal dari pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah (Indonesia, 2004).

Desentralisasi fiskal berdasarkan pendapatan besar dan otonomi pengeluaran untuk

pemerintah daerah, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak dan retribusi. Agar efektif, membutuhkan menghubungkan senang menghabiskan dengan rasa sakit dari generasi pendapatan, meningkatkan otonomi pendapatan, membangun kapasitas untuk menganalisis data untuk keputusan anggaran dan membangun kontrol fidusia yang tepat (Bank, 2011). Kondisi minimum diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk memobilisasi penerimaan dan diberikan akuntabilitas yang memadai dalam pengeluaran. Di sisi lain, kondisi ideal untuk wilayah adalah sebagai berikut : itu harus bebas dari kontrol pengeluaran yang berlebihan dari pemerintah pusat, transfer harus dilakukan tanpa banyak keterikatan dengan persyaratan sentralitas dan daerah harus diberi wewenang untuk membuat pinjaman (Purbadharmaja, Maryunani, Ananda, & Santoso, 2019).

Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi (Sasana, 2009). Dalam UU No. 33 tahun 2004 komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Mengenai efek eksplisit dalam bidang tata kelola keuangan publik, dampak desentralisasi terhadap pembangunan ekonomi telah sudah dinilai oleh sekelompok besar ilmuwan (Pasichnyi et al., 2019).

Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor penting untuk menentukan besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah. Terkait dengan pertumbuhan, daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya mendapatkan alokasi DAU yang lebih kecil. Namun demikian, meskipun konvergensi antar daerah mampu teratasi (dengan adanya transfer DAU), kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda. Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi. Pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi modal dasar yang kuat untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal (Adi, 2016).Meningkatnya transfer pemerintah (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, menimbulkan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris (Sasana, 2011).

Tetapi pendapat yang dinyatakan oleh Qiao “secara keseluruhan, desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan ukuran pemerintah, mendukung desentralisasi sebagai alat untuk mempromosikan kompetisi lokal sehingga membatasi ukuran pemerintah meningkat” (Qiao, Ding, & Liu, 2019). Sehingga daerah-daerah akan berkompetisi untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Hal yang menjadi pertanyaan menarik dalam penelitian ini adalah apakah daerah akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring diterapkan sistem desentralisasi ini.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik khususnya data tahun 2015sampai dengan tahun 2018. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi sebelum diterapkannya desentralisasi fiskal di semua daerah masih relatif rendah, terlebih ditengah upaya untuk melepaskan diri dari belenggu krisis. Daerah yang cepat maju dan tumbuh adalah daerah yang mempunyai pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan diatas rata-rata daerah yang lain. Tinggi nilai dua indikator perekonomian pada daerah ini paling tidak memberikan gambaran kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, kualitas layanan publik yang tinggi, maupun iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi yang secara positif berbeda dan signifikan ini ditentukan oleh pertumbuhan yang terjadi pada daerah-daerah yang bertipologi relatif tertinggal dan cepat maju tapi tertekan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen. Selama ini pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten dan kota) bisa dikatakan keliru dalam memaknai desentralisasi fiskal. Tidak efektifnya berbagai perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan investor untuk meningkatkan aktivitas investasi ini.

Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) berdasarkan hasil penelitian koefisiennya kecil, sehingga perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. Adapun retribusi yang belum optimal antara lain retribusi tempat penitipan anak, retribusi pengelolaan limbah cair. Disamping itu peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan perlu dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), perlu memperhatikan produkproduk unggulan daerah masing-masing atau sektor-sektor yang menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berarti punya kewenangan dalam mengatur keuangan daerah dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan tanda yang positif dan signifikan secara positif pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Sasana (2005). Hasil yang demikian mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di karesidenan Semarang dapat mengoptimalkan perolehan dana bagi hasil untuk kepentingan pembangunan daerah. Koefisien DBH sebesar 0,16 yang berarti apabila ada peningkatan DBH sebesar 10 persen, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat 1,6 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tanda yang negatif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Hal ini bisa dikatakan mayoritas kabupaten/kota menggantungkan pembiayaannya dari DAU. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sasana (2005), dengan hasil tanda yang negatif untuk pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), berarti pemerintah daerah di era desentralisasi masih

kurang dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerahnya secara optimal atas sektor-sektor pembangunan yang memberikan efek multiplier luas terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu masih relatif besarnya tingkat kebocoran yang terjadi, sehingga pengaruh Dana Alokasi Umum menjadi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja yang berkualitas akan tercipta dari pengeluaran anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah direncanakan. Alokasi belanja daerah sangat menentukan tingkat pemerataan perekonomian di daerah dimana porsi belanja modal yang produktif harus lebih besar dibandingkan porsi alokasi dana untuk subsidi dan belanja pegawai karena akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian. Salah satu indikator yang memiliki nilai loading faktor tertinggi adalah belanja barang dan jasa. Semakin tinggi belanja barang dan jasa, maka semakin tidak efisien. Tetapi, aktivitas belanja pemerintah terhadap barang dan jasa akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga belanja pemerintah berkualitas (Sasana, 2011).

Selama ini pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten dan kota) bisa dikatakan keliru dalam memaknai desentralisasi fiskal. Tidak efektifnya berbagai perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan investor untuk meningkatkan aktivitas investasi ini.

Banyak dari desentralisasi yang telah terjadi dalam dekade terakhir telah dimotivasi oleh kekhawatiran politik. Sebagai contoh, di Amerika Latin, desentralisasi telah menjadi bagian penting dari proses demokratisasi sebagai mendiskreditkan rezim pusat otokratis diganti oleh pemerintah terpilih beroperasi di bawah konstitusi baru. Namun, ada juga alasan yang kuat untuk desentralisasi dalam hal efisiensi ekonomi, akuntabilitas publik, dan pemberdayaan (Bank, n.d.).

Untuk memastikan akuntabilitas, berarti pendapatan harus dicocokkan sedekat mungkin dengan kebutuhan pendapatan. Dengan demikian instrumen pajak dimaksudkan untuk lebih tujuan kebijakan tertentu harus ditugaskan untuk tingkat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk layanan tersebut. pajak sehingga progresif redistributif, instrumen stabilisasi, dan pajak sewa sumber daya akan cocok untuk tugas kepada pemerintah nasional; sementara tol di jalan intermunicipal yang sesuai ditugaskan untuk pemerintah negara bagian. Di negara-negara dengan PPN tingkat federal, mungkin terlalu rumit untuk memiliki pajak penjualan sub-nasional. Dalam keadaan seperti itu, kriteria kebutuhan fiskal akan menyarankan memungkinkan pemerintah daerah mengakses pajak yang secara tradisional dianggap sebagai lebih cocok untuk administrasi nasional, seperti pajak penghasilan pribadi.

Manfaat utama dari desentralisasi adalah:

- Besar suara dan pilihan konstituen individu untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan pemerintah sub-nasional dan lokal untuk merespon secara dinamis untuk konstituen kekhawatiran

- Efisiensi Alokasi - pencocokan. kebutuhan lokal dan preferensi dengan pola pengeluaran publik lokal (mengasumsikan otonomi fiskal yang cukup besar).
- Pemberdayaan kabupaten, desa, masyarakat, dan konstituen individu.

Asumsi yang mendasari yang manfaat potensial istirahat desentralisasi meliputi:

- badan terpilih Perwakilan: Setiap anggota dewan memiliki mandat untuk mengartikulasikan kebutuhan suatu konstituen diidentifikasi dan dapat bertanggung jawab
- Inklusif lokal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tidak sistematis mengecualikan termiskin, kelompok yang paling rentan, kelompok x`sosial atau etnis tertentu.

Potensi bahaya dan tantangan desentralisasi meliputi:

- capture Elite
- politik Korupsi
- Binaan
- PNS setempat merasa terganggu
- Menghambat desentralisasi lanjut
- Informasi yang tidak lengkap
- Konstituen tidak mampu menahan perwakilan jawab

Salah satu faktor penting dalam menentukan jenis desentralisasi fiskal adalah sejauh mana entitas subnasional diberikan otonomi untuk menentukan alokasi pengeluaran mereka. (Faktor penting lainnya adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan.) Catatan ini menguraikan prinsip-prinsip dan praktek terbaik dan menyoroiti bagaimana spesifik negara pada akhirnya akan menjadi penentu terbaik dari tugas pengeluaran

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah diketahui di sini kami menarik kesimpulan bahwa perbedaan negara kesatuan dan negara republic memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari hasil ini kita tahu bahwa tidak hanya PAD, DBH, DAU dan belanja saja yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia desentralisasi fiskal kurang dijalankan secara maksimal, walaupun dengan dijalankannya system desentralisi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian bila dilakukan analisis secara parsial, perbedaan yang terjadi, hanya antara beberapa daerah saja. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang diindikasi kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang signifikan.

Dalam hal penerimaan kondisi daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah, terlebih lagi jika daerah tersebut daerah tertinggal, di mana sumber daya manusianya belum bisa menggali sumber daya alam yang ada. Dan dalam hal belanja, pemerintah daerah perlu memerhatikan pengeluaran dengan tidak hanya mementingkan pembangunan, pemerintah juga harus memerhatikan penerimaan mereka

DAFTAR REFERENSI

- Adi, P. H. (2016). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) 1. (October).
- Bank, W. (n.d.). Decentralization. Retrieved October 15, 2019, from <https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization>
- Bank, W. (2011). Fiscal Decentralization. Retrieved October 15, 2019, from <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm>
- Indonesia, P. R. (2004). Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang 33 Tahun 2004, 1–8.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepyaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 29–39. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)
- Pujiati, A. (2004). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi*, 5(33), 61–70.
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. *European Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.04.002>
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 103. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota provinsi jawa barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. 18(1), 46–58